

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pemilihan umum.....	17
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	36
C. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.....	50

D. Lembaga Peradilan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah	52
1. Mahkamah Agung	54
2. Mahkamah Konstitusi	64
BAB III. METODE PENELITIAN	89
A. Jenis dan Sifat Penelitian	89
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	96
C. Jalannya Penelitian	99
D. Analisis Hasil	100
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	102
A. Dinamika Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	102
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	104
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	108
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	110
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	111

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	112
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.....	114
B. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Rezim Pemilihan Kepala Daerah	127
1. Penafsiran Konstitusi	127
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Rezim Pemilihan Kepala Daerah	136
3. Analisis Penafsiran Rezim Pemilihan Kepala Daerah	166
C. Implikasi Penafsiran Rezim Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	176
1. Implikasi Dikeluarkannya Pemilihan Kepala Daerah Dari Rezim Pemilihan Umum	176
2. Studi Komparasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu dibeberapa Negara.....	183
3. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada	212
BAB V. PENUTUP.....	222

A. Kesimpulan	222
B. Saran	227
DAFTAR PUSTAKA	230